

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Asas desentralisasi diterapkan oleh Pemerintah Indonesia dalam menjalankan kewajibannya sebagai daerah otonom yang memberdayakan pemerintahannya secara mandiri. Pemerintah daerah mendapatkan kewenangan untuk membuat, melaksanakan, dan memutuskan kebijakan dari pemerintah pusat untuk mengatur pemerintahannya sendiri. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan pemerintah pusat untuk memberikan ruang otonomi secara luas bagi pemerintah daerah. Menurut Rosalinda (dalam Asmawati & Basuki, 2019) melalui otonomi daerah diharapkan pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pelayanan, dan pembangunan menjadi lebih efektif dan efisien. Kebijakan ini digunakan untuk memotivasi masyarakat dan pemerintah daerah agar memiliki kepedulian yang besar dan rasa tanggung jawab terhadap daerahnya dalam segala bidang kehidupan.

Kekayaan sumber daya alam di Indonesia berpotensi menjadi modal besar bagi pembangunan. Pemerintah daerah dalam implementasi otonomi daerah berupaya menawarkan potensi yang dimiliki daerahnya yang berupa sumberdaya manusia, sumberdaya alam, potensi budaya, pariwisata, maupun ekonomi sebagai bentuk upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Khoiroh & Astuti, 2019). Pariwisata menjadi salah satu sektor alternatif dalam pembangunan dan mampu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Pariwisata merupakan aktivitas atau kegiatan yang saling memberi dampak dan mempengaruhi satu

dengan lainnya yang meliputi masyarakat, pemerintah, kelompok organisasi, kelompok bisnis, komunitas, dan wisatawan yang menjadi sebuah sistem dalam kegiatan pembangunan daerah (Saputra & Ali, 2020). Pariwisata juga diartikan sebagai suatu perjalanan yang dilakukan dengan maksud kesenangan atau kepentingan lainnya dalam jangka waktu tertentu atau sementara waktu yang dilakukan oleh seseorang atau lebih ke suatu objek wisata.

Menurut Farida dkk., (2020) pariwisata saat ini menjadi *leading sector* dalam pembangunan ekonomi yang tercepat pertumbuhannya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Pariwisata juga menjadi sumber pendapatan dengan dibukanya lapangan pekerjaan, berkembangnya usaha dan adanya infrastruktur, sehingga pemerintah bersama dengan pengelola destinasi wisata harus gencar dan konsisten dalam meningkatkan kualitas pariwisata yang dimiliki. Munasef (dalam Chaerunissa & Yuniningsih, 2020) menjelaskan bahwa pengembangan pariwisata merupakan segenap kegiatan yang terkoordinasi untuk meningkatkan daya tarik wisata, menyediakan fasilitas dan infrastruktur, barang dan jasa, serta sarana prasarana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pengunjung atau wisatawan.

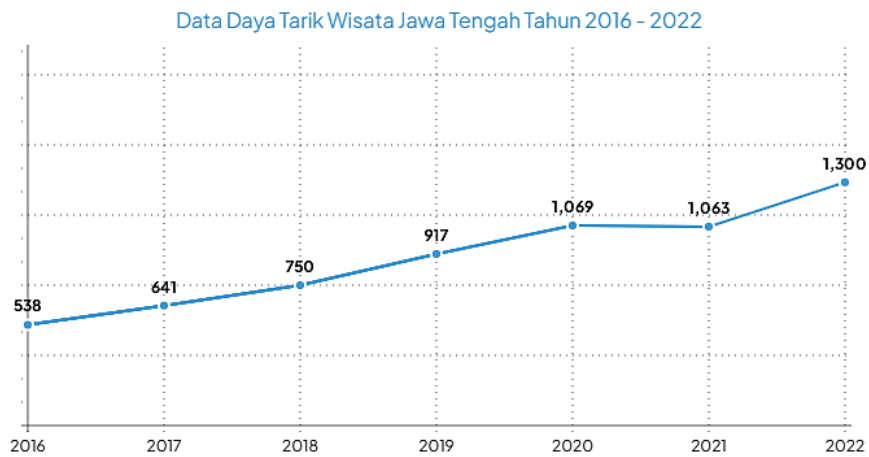
Pengembangan pariwisata sebagai bentuk pengembangan masyarakat dan wilayah dengan tujuan untuk melestarikan tradisi lokal masyarakat dan membentuk identitas daerah, meningkatkan pendapatan ekonomi, meningkatkan taraf hidup masyarakat, dan sebagai upaya memanfaatkan potensi pariwisata seoptimal mungkin. Pengembangan pariwisata berdampak pada terbukanya peluang kerja bagi masyarakat, munculnya kegiatan bisnis baru, meningkatnya

penerimaan pajak oleh pemerintah, dan sebagai upaya melestarikan sumberdaya alam serta memperkenalkan budaya dan potensi daerah.

Mewujudkan perkembangan pariwisata yang terarah dan sesuai dengan fungsi serta kapasitas daerah tentunya membutuhkan suatu pedoman. Menurut Nestorosk (dalam Aziza & Buchori, 2020) dengan tidak adanya dukungan dan arahan dari pembuat kebijakan maka akan berdampak buruk pada pengembangan pariwisata. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan menyebutkan bahwa “pembangunan kepariwisataan mencakup industri pariwisata, destinasi pariwisata, kelembagaan, dan pemasaran pariwisata yang diterapkan oleh tiap-tiap daerah berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional”. Undang-Undang tersebut juga menyatakan bahwa pariwisata merupakan kegiatan atau aktivitas wisata yang beragam dan mendapatkan dukungan dari berbagai sarana prasarana berupa fasilitas dan infrastruktur pariwisata serta layanan yang disediakan oleh pemerintah, masyarakat, dan pengusaha.

Kebijakan pariwisata di Indonesia terbagi dalam skala nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2027. Peraturan Daerah tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan program dan pengembangan kawasan serta daya tarik pariwisata di Provinsi Jawa Tengah.

Gambar 1.1 **Daya Tarik Wisata di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2022**



Sumber : (Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2022)

Provinsi Jawa Tengah merupakan wilayah yang memiliki beragam kearifan lokal dan keindahan alam pada setiap kabupaten dan kotanya. Jenis objek wisata yang dimiliki Provinsi Jawa Tengah cukup beragam misalnya wisata alam, sejarah, budaya, religi, dan sebagainya. Menurut Marpaung (dalam Mistriani & Pratamaningtyas, 2020) daya tarik wisata adalah suatu bentuk kegiatan dan fasilitas yang dapat menarik wisatawan untuk datang ke lokasi destinasi wisata tertentu. Daya tarik wisata di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2016 sampai tahun 2022 menunjukkan angka yang terus meningkat. Hingga di tahun 2022, daya tarik wisata mencapai angka 1.300. Berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah disebutkan bahwa Jawa Tengah menjadi salah satu provinsi yang ditetapkan sebagai Kawasan Wisata Andalan karena memiliki daya tarik wisata yang terkenal.

Tabel 1.1

**Jumlah Wisatawan Mancanegara dan Domestik di
Jawa Tengah Tahun 2016-2022**

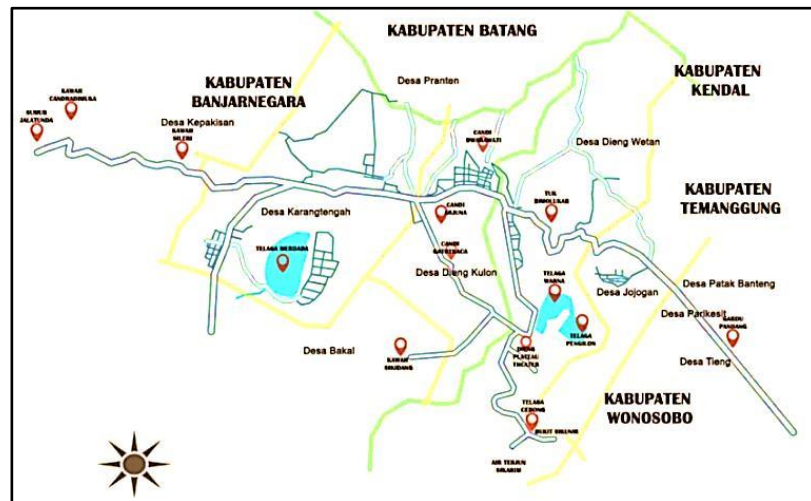
Tahun	Wisatawan Mancanegara	Wisatawan Domestik	Jumlah
2016	578. 924	36,8 juta	37,4 juta
2017	781. 107	40,2 juta	40,8 juta
2018	677. 168	48,9 juta	49,6 juta
2019	691. 699	57,9 juta	58,5 juta
2020	78. 290	22,6 juta	22,7 juta
2021	1.793	21,3 juta	21,3 juta
2022	129. 718	28,4 juta	28,5 juta

Sumber: (Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2022)

Tabel 1.1 menunjukkan jumlah wisatawan asing dan wisatawan domestik yang berkunjung ke Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2016 hingga tahun 2022, jumlah wisatawan meningkat ke berbagai destinasi di Provinsi Jawa Tengah. Tetapi, Pandemi Covid 19 yang meluas pada tahun 2020 dan 2021 menyebabkan berkurangnya jumlah wisatawan. Buku Statistik Pariwisata Jawa Tengah Tahun 2022 menyebutkan bahwa daya tarik wisata di Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 84 desa wisata, 454 wisata alam, 414 wisata buatan, 172 wisata budaya, 71 wisata minat khusus, serta 105 daya tarik wisata lainnya.

Dataran Tinggi Dieng menjadi salah satu tempat wisata favorit di Jawa Tengah. Pada tahun 2021, Kawasan Dataran Tinggi Dieng meraih penghargaan dan masuk sebagai salah satu dari 6 (enam) desa di Provinsi Jawa Tengah sebagai pemenang Anugrah Desa Wisata Indonesia (ADW) Kategori Desa Wisata Maju yang diselenggarakan oleh Kemenparekraf. Kawasan Dataran Tinggi Dieng merupakan kawasan wisata yang mempunyai potensi alam dan budaya yang dimanfaatkan sebagai daya tarik wisatawan, serta memiliki potensi pertanian, panas bumi, dan hutan lindung.

Gambar 1.2 **Peta Kawasan Wisata Dataran Tinggi Dieng**



Sumber : <https://diengcool.com>

Dieng Plateau berada pada ketinggian 2.565 meter di atas permukaan laut dan memiliki banyak potensi alam serta warisan budaya masa lalu. Kawasan Dataran Tinggi Dieng berada pada $4^{\circ}37'$ - $5^{\circ}15'$ Lintang Selatan, $106^{\circ}52'$ Bujur Timur. Kawasan ini dikelola oleh Pemerintah Daerah Kab. Banjarnegara dan Kab. Wonosobo karena letaknya yang berada di 2 (dua) wilayah administratif kabupaten tersebut, yaitu di Dieng Kulon dan Dieng Wetan dengan luas wilayah Dieng Kulon, Kabupaten Banjarnegara lebih luas, yaitu 383 Ha dibanding wilayah Dieng Wetan, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo yang hanya 282 Ha.

Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015-2030 berfungsi sebagai dasar untuk kebijakan pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Banjarnegara. Peraturan tersebut memuat visi, rencana, dan arah pembangunan kawasan wisata baik yang sudah berkembang maupun yang potensial untuk dikembangkan. Visinya adalah “Banjarnegara sebagai destinasi berdaya saing dalam upaya meningkatkan kontribusi sektor

kepariwisataan dan industri kreatif untuk kesejahteraan secara berkelanjutan”. Pengembangan daya tarik wisata di Kawasan Dataran Tinggi Dieng Kabupaten Banjarnegara berbasis pada nilai-nilai alam, budaya, dan minat khusus.

Sebagaimana dinyatakan dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015-2030 bahwa *stakeholder* yang diharapkan bertanggung jawab atas perencanaan, pembangunan kepariwisataan, kebudayaan adalah pemerintah, masyarakat lokal, akademisi, serta Lembaga Swadaya Masyarakat. Indikasi program pembangunan pariwisata Kawasan Dataran Tinggi Dieng Kabupaten Banjarnegara di antaranya : 1) meningkatkan akses jalan ke destinasi wisata potensial, 2) memperkuat kelompok seni budaya khas Dieng, 3) membangun infrastruktur, 3) menambah rambu pengaman di lokasi wisata rentan bencana, dan 4) membangun jalur interpretasi dan paket wisata kawasan Dieng.

Alam dan budaya merupakan bagian dari kehidupan yang sangat lekat dengan keseharian mayoritas masyarakat di Indonesia. *Dieng Plateau* adalah tempat wisata yang tidak hanya memiliki dataran tinggi yang dingin dan asri, tetapi juga menawarkan pengalaman budaya dengan peninggalan masa lalu yang masih dilestarikan. Karakteristik pariwisata kawasan ini cukup beragam dan terbilang unik, karena Daerah ini memiliki banyak telaga, lembah, kawah (hidrotermal), mata air, perbukitan, pusat produksi sayuran, serta kaya akan warisan budaya baik kebendaan maupun tak benda seperti makanan, tradisi, dan pertunjukan seni. Kawasan Dataran Tinggi Dieng masuk dalam perencanaan nasional, yaitu dalam Rencana Induk Kepariwisata Nasional (KSPN) Tahun

2010-2025. Berikut ini adalah contoh potensi pariwisata alam dan budaya di Kawasan Dataran Tinggi Dieng.

Gambar 1.3 **Potensi Pariwisata di Kawasan Dataran Tinggi Dieng Kabupaten Banjarnegara**



Telaga Merdada



Kawah Sikidang



Padang Savana



Telaga Dringo



Candi Arjuna



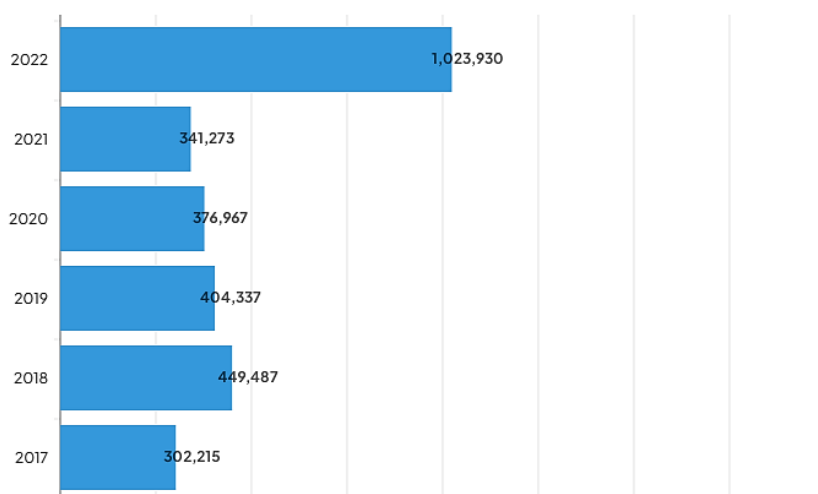
Dieng Culture Festival

Sumber : <https://dieng.travel/>

Kawasan Dataran Tinggi Dieng merupakan salah satu destinasi wisata terbesar kedua di Provinsi Jawa Tengah setelah Candi Borobudur. Jumlah

kunjungan wisatawan domestik dan asing di tahun 2017-2022 cenderung fluktuatif, tetapi di tahun 2020-2021 mengalami penurunan karena maraknya pandemi Covid 19 yang membatasi aktivitas masyarakat di berbagai sektor termasuk pariwisata. Jumlah kunjungan wisatawan meningkat dari tahun 2017 hingga 2022 meningkat pesat hingga mencapai 1.023.930 juta pengunjung. Jumlah kunjungan wisatawan Kawasan Dataran Tinggi Dieng dari tahun 2017-2022 dapat dilihat pada grafik berikut :

Gambar 1.4 **Jumlah Kunjungan Wisatawan Kawasan Dataran Tinggi Dieng Tahun 2017-2022**



Sumber : (Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Jawa Tengah, 2022)

Rantetadung (dalam Jauhariyah dkk., 2021) pertumbuhan sektor pariwisata dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bergantung pada jumlah kunjungan wisatawan. Kawasan Dataran Tinggi Dieng Kabupaten Banjarnegara masih menghadapi beberapa tantangan dalam mengembangkan kawasan wisata. Pemerintah daerah memiliki otonomi yang luas termasuk dalam bidang pariwisata untuk mendorong pengembangan potensi pariwisata dengan tujuan meningkatkan pendapatan. Tantangan keberlanjutan pariwisata daerah misalnya permintaan

lahan yang semakin tinggi akibat pertambahan populasi, terancamnya pertanian tradisional, pencemaran lingkungan, serta ketersediaan akses yang memadai. Peran dari *stakeholders* diharapkan dapat terjalin untuk mengatasi permasalahan tersebut sehingga mampu mengoptimalkan pengembangan pariwisata.

Pertama, kondisi fasilitas objek wisata yang belum lengkap dan layak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan menyebutkan bahwa pariwisata merupakan kegiatan didukung oleh banyak fasilitas dan layanan yang disediakan oleh masyarakat, individu, pemerintah, dan bisnis. Fasilitas pariwisata yang dibutuhkan wisatawan menjadi menjadi pelengkap dari tujuan wisata dan sebagai bentuk pemberian layanan. Menurut Inskeep (dalam Zebua, 2018) menyebutkan bahwa fasilitas dan pelayanan meliputi (1) tempat makan dan minum, (2) akomodasi, (3) tempat belanja, (4) fasilitas umum pariwisata, (5) dan fasilitas jasa wisata.

Fasilitas pariwisata di Kawasan Dataran Tinggi Dieng dinilai kurang lengkap, misalnya fasilitas kebersihan seperti kurangnya keberadaan tempat sampah di sepanjang jalan utama dan di dalam objek wisata. Kebersihan lingkungan menjadi poin penting yang perlu diperhatikan karena berkaitan dengan kenyamanan wisatawan yang berkunjung. Semakin banyaknya wisatawan yang datang maka potensi munculnya sampah akan lebih banyak dan tidak terkendali. Selain itu juga, fasilitas umum pariwisata yang dinilai kurang lengkap dan layak adalah belum adanya pos pengawas dan pos informasi yang digunakan sebagai pusat informasi pariwisata. Bahkan terdapat loket masuk objek wisata yang

terbengkalai karena kurangnya perawatan yang dilakukan yaitu loket masuk ke Candi Setyaki.

Gambar 1.5 Loket Masuk Candi Setyaki yang Terbengkalai



Sumber : dokumentasi penulis, 2024

Kedua, kondisi infrastruktur wisata yang belum memadai. Infrastruktur pariwisata merupakan bentuk penyediaan aset fisik yang direncanakan dan dirancang untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan mendukung berjalannya kegiatan wisata. Kemudahan akses jalan menuju destinasi wisata menjadi salah satu bentuk infrastruktur yang dibutuhkan wisatawan. Akibat dari akses jalan yang belum memadai dan banyaknya pengunjung objek wisata di Kawasan Dataran Tinggi Dieng Kabupaten Banjarnegara terutama ketika libur panjang seringkali menyebabkan kemacetan. Selain itu, akses jalan yang berkelok dengan tanjakan dan tikungan tajam menjadi tantangan tersendiri bagi wisatawan untuk menuju objek wisata.

Gambar 1.6 **Kondisi Jalan Menuju Objek Wisata Kawah Sikidang yang Rusak**



Gambar 1.7 **Tumpukan Pupuk di Pinggir Jalan**



Gambar 1.8 **Kondisi Pipa Paralon Melintang di Objek Wisata Candi Arjuna**



Sumber : dokumentasi penulis, 2024

Kondisi jalan menuju destinasi wisata di Kawasan Dataran Tinggi Dieng Kabupaten Banjarnegara masih ditemukan titik jalan yang mengalami kerusakan,

salah satunya jalan menuju objek wisata Telaga Merdada, Candi Arjuna, dan Kawah Sikidang. Jalan yang dilalui untuk menuju objek wisata tersebut cenderung menanjak, jalan berlubang, dan sempit. Selain itu, ditemukan permasalahan terkait infrastruktur lainnya berupa gangguan pipa paralon melintang dan pupuk di pinggir jalan yang mengganggu kenyamanan wisatawan baik dalam segi keindahan bahkan keselamatan bagi pengguna jalan. Pembangunan jalan di Kawasan Dataran Tinggi Dieng Kabupaten Banjarnegara yang tidak disertai drainase atau saluran air yang memadai menyebabkan genangan dan banjir.

Ketiga, perubahan fungsi lahan yang semula berupa hutan lindung menjadi lahan pertanian dan objek wisata. Penanganan terkait permasalahan lahan di Kawasan Dataran Tinggi Dieng Kabupaten Banjarnegara belum menemukan solusi terbaik untuk penyelesaian permasalahan secara komprehensif yang memperhatikan keseimbangan ekologis dan kepentingan ekonomi. Kawasan Dataran Tinggi Dieng masih minim pemeliharaan terkait konservasi sehingga menyebabkan kerusakan lingkungan. Kerusakan terjadi akibat dari penebangan hutan di kawasan hutan lindung dan menggunakannya untuk lahan pertanian kentang. Perubahan fungsi lahan tersebut menjadi permasalahan ekologi yang harus mendapatkan perhatian.

Saat ini, lebih dari 7000 hektar lahan di Kawasan Dataran Tinggi Dieng menjadi lahan kritis dengan tingkat erosi sebesar 161 ton/ha/tahun (Yuninata, 2023). Penebangan hutan secara besar-besaran mulai dilakukan karena potensi tanaman kentang di Dataran Tinggi Dieng mulai diperkenalkan. Kegiatan tersebut

mengakibatkan perbukitan menjadi gundul dan telaga mengalami pendangkalan karena erosi dan juga dijadikan sumber irigasi pertanian. Salah satu objek wisata yang mengalami degradasi lahan yang cukup parah adalah lahan sekitar objek wisata Telaga Merdada yang ditandai dengan warna air yang keruh, adanya pendangkalan atau sedimentasi, dan rusaknya hutan lindung yang kini berubah menjadi lahan pertanian. Sedimentasi yang terjadi di objek wisata Telaga Merdada menyebabkan menyusutnya air dan tumbuhnya ganggang di seluruh permukaan telaga. Kerusakan hutan, air, dan tanah berpengaruh terhadap keberadaan dan kelestarian objek wisata di sekitarnya terutama yang berupa telaga. Sedimentasi yang terjadi secara terus menerus mengakibatkan telaga menjadi dangkal dan akhirnya mulai menghilang seperti yang terjadi pada Telaga Swiwi dan Telaga Balaikambang.

Gambar 1.9 **Kondisi Objek Wisata Telaga Merdada yang Ditumbuhi Ganggang dan Telaga Balaikambang yang Mulai Menyusut**



Sumber : dokumentasi penulis, 2024

Keempat, permasalahan sampah di sekitar objek wisata. Dibalik keindahan alamnya, Kawasan Dataran Tinggi Dieng menyimpan persoalan sampah yang

sering menjadi keluhan. Angka kunjungan wisatawan yang tinggi menyebabkan semakin banyak pula sampah yang dihasilkan. Gunung sampah yang menumpuk di lahan milik Perhutani di Desa Dieng Kulon, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara menjadi permasalahan yang cukup serius karena mengganggu kenyamanan wisatawan yang berkunjung. Apalagi lokasi pembuangan sampah tersebut berada di jalan utama menuju objek wisata Kawah Sikidang. Keberadaan sampah yang menggunung dan tidak tertangani berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan, pencemaran sumber mata air, dan menurunkan derajat kesehatan masyarakat, kualitas lingkungan, serta mengancam sektor wisata. Untuk mewujudkan pariwisata yang bebas dan bersih dari sampah perlu peran dari *stakeholders* untuk mendorong kualitas wisata diawali dengan kebersihan lingkungan.

Gambar 1.10 **Kondisi Tumpukan Sampah di Desa Dieng Kulon**



Sumber : <https://sigijateng.id>

Kelima, kondisi perbukitan yang didominasi pertanian kentang dan rawan longsor. Kawasan Dataran Tinggi Dieng terletak di kompleks gunung api aktif yang menyebabkan tanah-tanah vulkanik menjadi subur. Tanaman kentang menjadi komoditas utama dan diminati petani karena dapat menghasilkan

perputaran uang yang cepat karena bisa dipanen 3 (tiga) kali dalam satu tahun. Kondisi kemiringan lahan di Dieng mencapai 23 derajat dan ditanami tanaman semusim secara intensif serta tidak memperhatikan kaidah konservasi lahan. Selain itu, penggunaan pupuk organik oleh petani yang diletakkan tidak sesuai tempatnya dapat memicu munculnya penyakit, mengeluarkan bau tidak sedap, serta rusaknya tanah akibat suhu panas yang dihasilkan ketika lapuk.

Gambar 1.11
Pupuk Organik Milik Petani yang Diletakkan di Pinggir Jalan dan Kondisi Perbukitan yang Ditanami Kentang



Sumber : dokumentasi penulis, 2024

Pertanian kentang dianggap mengganggu fungsi hutan lindung sebagai daerah resapan air dan mengakibatkan peningkatan laju aliran air dan erosi. Kerusakan hutan lindung tersebut berpengaruh terhadap keberadaan dan kelestarian objek-objek wisata di sekitarnya. Misalnya perbukitan di Kompleks Candi Arjuna yang saat ini gundul sehingga menyebabkan banjir dan tanah longsor saat musim hujan, akibatnya seringkali terdapat longsor tanah di jalan dan genangan lumpur yang mengganggu akses utama menuju objek wisata.

Penelitian terkait peran *stakeholder* terhadap pengembangan pariwisata telah banyak dilakukan salah satu di antaranya, yaitu berjudul “Peran *Stakeholders* Dalam Pengembangan Pantai Pulau Merah Kabupaten Banyuwangi Sebagai Destinasi Wisata Bahari” oleh Lena dkk pada tahun 2022. Tumbuhnya pariwisata disana telah memberikan manfaat bagi perekonomian masyarakat. *Stakeholders* baik pemerintah, masyarakat, maupun swasta mampu bersinergi dan berkolaborasi dengan sangat baik sehingga pengembangan pariwisata yang dilakukan mampu meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan di Pantai Pulau Merah. Pengembangan pariwisata yang dilakukan yaitu berupa pembinaan sumber daya manusia dalam mengelola tempat wisata, pembangunan sarana dan prasarana, serta promosi yang dilakukan melalui pameran, media (*online/offline*), serta *event* pariwisata. Pihak swasta terlibat dalam membantu aksesibilitas, pemberdayaan masyarakat lokal, dan pemanfaatan CSR. Peran *stakeholder* yang optimal dan mampu bertanggung jawab menjadi latar belakang keberhasilan pengembangan pariwisata di Pantai Pulau Merah.

Penelitian lain dilakukan oleh I Nyoman Sukma dkk pada tahun 2022 yang berjudul “Peran *Stakeholders* dalam Pengembangan Desa Wisata Kerta Kecamatan Payangan Kabupaten Gianyar”. Pariwisata berbasis pedesaan melalui pemanfaatan potensi desa belum mampu dikembangkan secara optimal. Hal ini terjadi karena keterbatasan fasilitas penunjang pariwisata, lemahnya kualitas sumber daya manusia, serta promosi yang belum efektif dan berdampak pada angka kunjungan wisata, sehingga perlu dilakukan peningkatan kontribusi *stakeholders* untuk saling bekerja sama mengembangkan potensi pariwisata desa.

Stakeholders yang berperan dalam pengembangan Desa Wisata Kerta diantaranya akademisi dari Universitas Udayana, pihak swasta seperti CV. *Seikou International*, *The Yogi's Garden* Bali, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gianyar Aman, komunitas adat, pokdarwis, dan media.

Ginting dkk., (2022) mengatakan bahwa pengembangan pariwisata membutuhkan peran dari tiga *stakeholders* yang sangat penting, yaitu masyarakat, pemerintah, dan swasta. Pengembangan pariwisata tidak akan berjalan maksimal tanpa adanya peran dari *stakeholders*. Peran *stakeholder* dalam pengembangan pariwisata di Kawasan Dataran Tinggi Dieng dapat dikatakan belum maksimal, karena masih terlihat peran dari aktor kepentingan yang belum sepenuhnya mampu mengatasi permasalahan untuk mendukung pengembangan pariwisata seperti ketersediaan fasilitas, sarana dan prasarana yang belum memadai, keamanan, serta keseimbangan ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan. Pengembangan pariwisata dapat terwujud dan berjalan dengan maksimal apabila tiap *stakeholder* memiliki fungsi dan perannya masing masing. Pengembangan pariwisata yang berkelanjutan erat hubungannya dengan keterlibatan *stakeholder* (Duante & Nyanjom, 2017).

Berdasarkan uraian di atas, pengembangan Kawasan Dataran Tinggi Dieng membutuhkan peran dari berbagai para pemangku kepentingan atau *stakeholders* karena memiliki potensi pariwisata yang besar, namun implementasinya belum maksimal, maka dalam tulisan ini akan mengkaji tentang “Peran *Stakeholder* dalam Pengembangan Pariwisata di Kawasan Dataran Tinggi Dieng Kabupaten Banjarnegara”.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Fasilitas pariwisata di Kawasan Dataran Tinggi Dieng Kabupaten Banjarnegara masih kurang lengkap dan layak terutama fasilitas umum pariwisata, misalnya kurangnya keberadaan tempat sampah di sepanjang jalan utama dan di dalam objek wisata, belum adanya pos pengawas dan pos informasi yang digunakan sebagai pusat informasi pariwisata, serta loket masuk objek wisata yang terbengkalai karena kurangnya perawatan yang dilakukan yaitu loket masuk ke Candi Setyaki.
2. Masih ditemukan beberapa titik jalan yang mengalami kerusakan, salah satunya jalan menuju objek wisata Telaga Merdada, Candi Arjuna, dan Kawah Sikidang, adanya gangguan pralon melintang dan pupuk di pinggir jalan yang mengganggu kenyamanan wisatawan baik dalam segi keindahan atau keselamatan pengguna jalan.
3. Kurangnya konservasi lingkungan di Kawasan Dataran Tinggi Dieng yang memperhatikan keseimbangan ekologis dan kepentingan ekonomi. Permasalahan ekologi yang terjadi berupa perubahan fungsi lahan hutan lindung menjadi lahan pertanian sehingga menyebabkan banyaknya lahan kritis di Dieng.
4. Permasalahan sampah di sekitar objek wisata yang belum optimal pengelolaannya. Keberadaan sampah yang menggunung dan tidak tertangani berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan,

pencemaran sumber mata air, dan menurunkan derajat kesehatan masyarakat.

5. Kondisi perbukitan yang didominasi pertanian kentang dan rawan longsor.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Siapa saja *stakeholder* yang berperan dalam pengembangan pariwisata di Kawasan Dataran Tinggi Dieng Kabupaten Banjarnegara?
2. Bagaimanakah peran *stakeholder* dalam pengembangan pariwisata di Kawasan Dataran Tinggi Dieng Kabupaten Banjarnegara?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian yang hendak dicapai, yaitu sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi siapa saja yang menjadi *stakeholder* dalam pengembangan pariwisata di Kawasan Dataran Tinggi Dieng Kabupaten Banjarnegara.
2. Menganalisis peran *stakeholder* dalam pengembangan pariwisata di Kawasan Dataran Tinggi Dieng Kabupaten Banjarnegara.

1.5 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan penjelasan dan analisis yang terdapat dalam penelitian ini, diharapkan mampu memberikan manfaat yang bisa dirasakan oleh beberapa pihak. Manfaat tersebut diantaranya sebagai berikut;

a. Kegunaan Teoritis

Diharapkan temuan dari penelitian ini bisa berfungsi sebagai referensi bagi peneliti lain yang mengkaji tentang pengembangan pariwisata di suatu daerah serta sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan secara teoritis untuk dipelajari di seluruh jenjang pendidikan. Penelitian ini sebagai bentuk kontribusi dalam pengembangan pengetahuan ilmu administrasi publik terutama pemahaman tentang peran pemangku kepentingan dalam upaya pengembangan pariwisata. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi pedoman atau sumber referensi bagi penelitian lainnya di waktu mendatang yang berfokus pada topik yang sama.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini memberikan manfaat yang penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan, meningkatkan pemahaman pengalaman peneliti, serta menjadi bahan masukan bagi para *stakeholder* yang terlibat dalam pengembangan pariwisata di Kawasan Dataran Tinggi Dieng Kabupaten Banjarnegara.

1.6 Manfaat Penelitian

a. Bagi Aktor Pemerintah

Penelitian tentang dalam pengembangan pariwisata di Kawasan Dataran Tinggi Dieng Kabupaten Banjarnegara ini diharapkan dapat menjadi masukan atau rekomendasi kepada seluruh aktor pemerintah dan menjadi bahan evaluasi untuk memungkinkan aktor-aktor tersebut melaksanakan tugas dan fungsi mereka.

b. Bagi Pembaca

Penelitian tentang dalam pengembangan pariwisata di Kawasan Dataran Tinggi Dieng Kabupaten Banjarnegara diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan bagi pembaca.

c. Bagi Masyarakat

Diharapkan penelitian tentang pengembangan pariwisata di Kawasan Dataran Tinggi Dieng Kabupaten Banjarnegara dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengembangan pariwisata di suatu daerah. Masyarakat akan memahami dengan lebih baik bagaimana kontribusi dan peran yang dimainkan oleh berbagai pihak, sehingga masyarakat mampu lebih aktif dan terlibat dalam pengembangan pariwisata dengan memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki serta berkolaborasi dengan pemerintah dan *stakeholder* lainnya untuk kepentingan bersama.

1.7 Kajian Pustaka

1.7.1 Penelitian terdahulu

Tabel penelitian terdahulu di bawah ini menunjukkan bahwa terdapat penelitian lain yang pernah diteliti dan memiliki kesamaan tertentu dengan penelitian yang sedang dilakukan, namun tabel ini berupaya menunjukkan tidak adanya plagiasi dari penelitian sebelumnya.

Tabel 1.2
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1	(Liu dkk., 2020)	<i>Analizing Government Role in Rural Tourism Development :An Empirical Investigation From China</i>	Interaksi sinergis antar pemangku kepentingan mendukung perkembangan pariwisata yang pesat. Pemerintah pusat berperan sebagai pembimbing desa wisata. Pemerintah daerah berperan dalam melayani dan mengelola pariwisata secara langsung, berkoordinasi dengan pihak swasta dan masyarakat untuk menyediakan pelayanan kepada wisatawan serta memecahkan permasalahan
2	(Mardiana Ike, 2019)	<i>Analysis of Stakeholderss Role in Development of Bandungan Chrysanthemum Agrotourism at Semarang District, Indonesia</i>	Terdapat 11 <i>stakeholders</i> yang berperan dalam pengelolaan dan pengembangan pariwisata Kebun Bunga Setiya Aji yaitu terdiri dari pemerintah, masyarakat, akademisi, dan swasta. <i>Stakeholders</i> tersebut dapat meningkatkan komunikasi dan menyelaraskan kegiatan atau program kerja serta berkolaborasi dengan <i>stakeholders</i> lainnya dalam mengembangkan agrowisata

No	Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
3	(Ramadesta dkk., 2022)	<i>The Role of Stakeholders in the Development of Mangrove Eco Tourism at Blekok Tourism Village, Situbondo, East Java</i>	Peran <i>stakeholders</i> dalam pengembangan ekowisata mangrove melibatkan pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan media. Pengelolaan pariwisata Desa Wisata Blekok berhasil bekerjasama dengan <i>stakeholders</i> , namun terdapat satu peran yang belum berhasil yaitu bidang media massa
4	(Widowati & Larasati, 2021)	<i>The Pentahelix Stakeholders Analysis on Tourism Development in Tanjungpinang</i>	1. Pengembangan destinasi pariwisata Tanjungpinang melibatkan <i>stakeholders</i> dari masyarakat, akademisi, komunitas, perusahaan, pemerintah, dan media 2. Terdapat 38 pemangku kepentingan yang terlibat dengan peran <i>stakeholders</i> yang dijalankan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Namun, peran akademisi perguruan tinggi setempat belum optimal 3. Kepercayaan dan kebijakan menjadi aspek penghambat pengembangan pariwisata Tanjungpinang
5	(Sulistiowati dkk., 2020)	<i>Stakeholders Partnership in the Management of Marien Tourism in South Lampung Regency, Lampung</i>	<i>Stakeholders</i> yang terlibat dalam pengelolaan wisata alam terdiri dari: 1) Dinas Pariwisata, 2) PT Kahaii, 3) LSM, 4) Himpunan Pemandu Wisata Indonesia (HPI) dan Asosiasi Agen Perjalanan Wisata (ASITA), 5) Asosiasi Pengusaha Taman Rekreasi Indonesia (PUTRI) dan Event Organizer Association (AEO), 6) Kelompok Masyarakat atau Pokdarwis, 7) Forum Komunikasi Pokdarwis, 8) KPK (Komunitas Krakatau Putera), 9) Dinas Kebudayaan, 10) Bappeda, dan 11) Dinas Pekerjaan Umum, dan masyarakat

No	Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
6	(Solymanneja dkk., 2022)	<i>Stakeholders Analysis of Sustainable Development of Agricultural Tourism in the West of Mazandaran Province</i>	Pemangku kepentingan atau <i>stakeholders</i> utama dalam pengembangan pariwisata adalah pemerintah dan organisasi masyarakat
7	(Gravitiani dkk., 2022)	<i>The Role of Stakeholders in Sustainable Tourism using Mactor Analysis : Evidence from Kragilan Top Selfie, Magelang, Indonesia</i>	<i>Stakeholders</i> atau aktor penting yang terlibat di antaranya: 1) Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata, 2) Pemerintah Desa, 3) Kelompok Sadar Wisata, 4) Wisatawan, 5) Masyarakat lokal, dan 6) Pelaku usaha. Hasilnya adalah, Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata, Kelompok sadar wisata menjadi aktor utama dalam mengembangkan pariwisata di Top-Selfie Kragilan.
8	Natalia Paramitha, dkk (2019)	<i>Identification, Characterization and Stakeholder Analysis of Eco-tourism Destinations in Lake Toba Area</i>	<i>Stakeholders</i> yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam tata kelola dan kebijakan desinasi ekowisata di kawasan Danau Toba terdiri dari Kementerian Pariwisata, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup sebagai <i>stakeholders</i> kunci. Sektor swasta, media massa, dan komunitas lokal sebagai <i>stakeholders</i> sekunder.
9	(Destiana dkk., 2020)	Analisis Peran <i>Stakeholders</i> dalam Pengembangan Destinasi Pariwisata Halal di Pulau Penyengat Provinsi Kepulauan Riau	Pemerintah, masyarakat, komunitas, perusahaan, akademisi, dan media. Peran <i>stakeholders</i> tercermin dalam peran <i>policy creator</i> , koordinator, fasilitator, implementor dan akselerator. Faktor pendukung pengembangan pariwisata adalah nilai dan komunikasi, sedangkan faktor penghambatnya adalah kepercayaan dan kebijakan pemerintah

No	Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
10	(Ginting dkk., 2022)	Analisis Peran <i>Stakeholders</i> dalam Pengembangan Pariwisata Siosar	Peran pemangku kepentingan atau <i>stakeholders</i> dalam pengembangan kawasan wisata Siosar belum signifikan. <i>Stakeholders</i> yang terlibat sudah menjalankan perannya, namun hasilnya belum optimal karena adanya ketimpangan peran baik pemerintah, masyarakat, hingga swasta. Hal ini terjadi karena belum terjalin kerjasama dan komunikasi yang baik

Sumber : diolah oleh penulis dari berbagai artikel jurnal, 2023

Pada tabel 1.2 dapat dilihat bahwa dalam penelitian terdahulu, analisis dan peran dari *stakeholders* sudah diterapkan dalam berbagai pemerintah daerah di Indonesia dan negara lain. Kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian terdahulu tersebut adalah dalam melakukan pengembangan pariwisata diperlukan peran dari para *stakeholders* atau pemangku kepentingan yang terlibat dalam kegiatan maupun program kepariwisataan.

Penelitian yang dilakukan oleh Chunyan Liu, dkk (2020) yang berjudul “*Analizing Government Role in Rural Tourism Development : An Empirical Investigation from China*” yang mengembangkan desa wisata sebagai hasil dari kebijakan pemerintah pusat yang menerapkan kebijakan regenerasi desa. Hal ini diakui oleh berbagai akademisi di Tiongkok. Pemerintah pemerintah daerah dan pemerintah pusat memainkan peran mereka untuk mengembangkan wisata di pedesaan dengan mengelola pariwisata dan berkoordinasi dengan pihak swasta serta masyarakat. Interaksi secara sinergis antara pemerintah pusat dan daerah di Tiongkok mendorong pesatnya pengembangan desa wisata tersebut.

Penelitian lainnya berhasil dilakukan oleh Mardiana Ike dkk (2019) dengan judul “*Analysis of Stakeholders Role in Development of Bandungan Chrysanthemum Agrotourism at Semarang District, Indonesia*”. Pada penelitian ini, menjelaskan tentang pembangunan pariwisata berkelanjutan yang memerlukan kerjasama berbagai pihak dalam sektor pariwisata. *Stakeholders* yang berperan aktif di antaranya pemerintah, swasta, masyarakat, dan akademisi. Potensi agrowisata Kebun Bunga Setya Aji yang terletak di Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang melibatkan 11 pemangku kepentingan yang terdiri dari pemerintah, masyarakat, akademisi, dan sektor swasta. Berdasarkan hasil penelitian menyebutkan bahwa pemangku kepentingan utama adalah kelompok pengelola yang terdiri dari petani dan masyarakat setempat.

Penelitian oleh Prayudo Ramadesta dkk (2022) yang berjudul “*The Role of Stakeholders in Development of Mangrove Eco-Tourism at Blekok Tourism Village, Situbondo, East Java*”. Penelitian tersebut dilakukan untuk menganalisis peran pemangku kepentingan dalam pengembangan ekowisata mangrove. *Stakeholders* yang berperan dalam pengembangan ekowisata ini terdiri dari pemerintah, pelaku usaha, komunitas, akademisi, dan media. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan ekowisata di Desa Wisata Blekok, Kabupaten Situbondo berkembang secara fluktuatif. Pengembangan Desa Wisata Blekok berhasil dilakukan dengan kolaborasi antar pemangku kepentingan, yaitu : (1) Pemerintah berperan dalam mengelola retribusi pariwisata, membuat peraturan tertulis, dan membuat penataan tempat usaha, (2) Kelompok Sadar Wisata berperan dalam memberikan pelatihan kepada para pedagang dan pengelola

akomodasi, (3) Kelompok pelaku usaha, berperan dalam membangun bisnis yang lebih maju dan meminimalisir dampak negatif. Namun, pelaku usaha masih kurang dalam memasarkan produknya sehingga penjualan belum maksimal. Terdapat satu peran yang belum optimal karena kurangnya kerjasama yaitu di bidang media massa.

Penelitian terdahulu lainnya berjudul “*The Pentahelix Stakeholders Analysis on Tourism Development in Tanjungpinang*” yang disusun oleh Widowati dan Larasati (2021). Permasalahan yang dihadapi Kota Tanjungpinang dalam pengembangan pariwisata, yaitu belum maksimalnya peran *stakeholder* dalam kemitraan antar pemangku kepentingan atau pelaku usaha pariwisata. Pemangku kepentingan yang berperan dalam pengembangan pariwisata di Kota Tanjungpinang berjumlah 38 *stakeholders* yang terdiri dari masyarakat, pemerintah, akademisi, pengusaha, komunitas, dan media. Namun, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjungpinang masih kurang melibatkan partisipasi akademisi untuk berkontribusi dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pengembangan pariwisata, sedangkan aspek penghambatnya, yaitu aspek kepercayaan dan aspek kebijakan.

Penelitian lainnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Sulistiowati dkk (2020) yang berjudul “*Stakeholders Partnership in the Management of Marien Tourism in South Lampung Regency, Lampung*”. Penelitian tersebut dilatarbelakangi oleh peluang potensi pariwisata bahari di Kabupaten Lampung Selatan, namun angka kunjungan wisatawan lokal dan asing masih rendah. Upaya pelibatan peran pemerintah dan masyarakat dalam pengembangan pariwisata

sudah dilakukan, namun sinergitas antar pemerintah dengan pelaku usaha swasta dan masyarakat sipil seperti LSM dan Pokdarwis belum optimal. Pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan pariwisata bahari di Kabupaten Lampung Selatan berjumlah 12 *stakeholders* yang terdiri dari instansi pemerintah provinsi maupun kabupaten, kelompok masyarakat, lembaga swasta, pengusaha dan masyarakat.

Penelitian selanjutnya oleh Soleimannejad dkk (2022) yang berjudul “*Stakeholders Analysis of Sustainable Development of Agricultural Tourism in the West of Mazandaran Province*”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemangku kepentingan dalam pembangunan berkelanjutan agrowisata di barat Provinsi Mazandaran. Pembangunan agrowisata berkelanjutan menjadi salah satu solusi dalam pemanfaatan industri pariwisata secara optimal. Namun, dalam pengembangan agrowisata berkelanjutan ini belum optimal karena kurangnya mekanisme untuk mengidentifikasi dan menganalisis *stakeholders* yang harus terlibat dalam kegiatan atau program pengelolaan pembangunan agrowisata berkelanjutan. Pembangunan pariwisata berkelanjutan merupakan pembangunan yang dilakukan secara seimbang dan komprehensif di semua sektor, sehingga perlu identifikasi pemangku kepentingan, penetapan peran dan perencanaan.

Penelitian terdahulu juga berhasil dilakukan oleh Gravitiani dkk (2022) yang berjudul “*The Role of Stakeholders in Sustainable Tourism using Mactor Analysis : Evidence from Kragilan Top Selfie, Magelang, Indonesia*”. Isu strategis dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan di Wisata Top Selfie, Kragilan yaitu tentang peningkatan pendapatan, perluasan lapangan pekerjaan, peningkatan

wisatawan, pengentasan kemiskinan, menjaga kearifan lokal, pembangunan infrastruktur, dan pelestarian hutan pinus. *Stakeholders* atau pemangku kepentingan utama yang berperan dalam pengembangan pariwisata tersebut adalah Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Magelang, Pengurus Taman Nasional Gunung Merbabu, dan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). Pemerintah Desa menjadi *stakeholders* yang sangat bergantung dengan keputusan dan kebijakan yang dibuat aktor utama. Sedangkan masyarakat lokal merupakan aktor yang terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan program kegiatan, dan kebijakan yang dibuat oleh *stakeholders* utama.

Penelitian lainnya berjudul “Pengembangan Destinasi Wisata Halal Pulau Penyengat” yang dilakukan oleh Destiana dkk (2020) di mana dalam penelitian tersebut ditemukan hasil bahwa *stakeholders* yang terlibat dalam pengembangan destinasi wisata terdiri dari pemerintah, akademisi, komunitas, bisnis dan media massa. *Stakeholders* tersebut diidentifikasi menjadi *stakeholders* utama, kunci dan sekunder. Peran *stakeholders* tercermin dalam peran sebagai *policy creator*, koordinator, fasilitator, implementor dan akselerator. Faktor pendukung pengembangan destinasi pariwisata yaitu, nilai dan komunikasi, sedangkan faktor penghambatnya adalah kepercayaan dan kebijakan.

Penelitian terdahulu lainnya yang dilakukan oleh Ginting dkk (2021) dengan judul “Analisis Peran *Stakeholders* dalam Pengembangan Pariwisata Siosar”. Siosar memiliki potensi pariwisata yang besar untuk dikembangkan. Namun, upaya pengembangan pariwisata belum dilakukan dengan maksimal karena masih ditemukan kurangnya fasilitas, sarana dan prasarana yang memadai, akses jalan

yang sulit, kecil, sempit, dan jauh serta mengalami kerusakan di berbagai titik, kemacetan, lokasi parkir yang sulit, banyaknya sampah, dan toilet yang kurang bersih. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara perencanaan dan implementasi di lapangan baik dari pemerintah, masyarakat, maupun swasta.

Perbedaan tabel penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dengan judul ”Peran *Stakeholders* Dalam Pengembangan Pariwisata Di Kawasan Dataran Tinggi Dieng Kabupaten Banjarnegara” adalah lokasi penelitian. Berdasarkan tabel penelitian terdahulu di atas yang menunjukkan penelitian terkait peran *stakeholder* dalam pengembangan pariwisata, belum ada penelitian yang dilakukan untuk menganalisis bagaimana “Peran *Stakeholders* Dalam Pengembangan Pariwisata di Kawasan Dataran Tinggi Dieng” khususnya wilayah Kabupaten Banjarnegara.

1.7.2 Administrasi Publik

Menurut Trecker (dalam Keban, 2014) administrasi bertujuan untuk memecahkan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kebijakan publik melalui koordinasi serta kerjasama personel dan sumberdaya publik untuk mencapai tujuan, sehingga salah satu tugas pemerintah adalah mengatur administrasi publik dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat. Administrasi publik bertanggung jawab untuk menyelenggarakan kepentingan publik dengan isu penting di dalamnya yang meliputi daya tanggap terhadap masalah yang sedang terjadi dalam berbagai skala, transparansi, marginalisasi,

keadilan, akuntabilitas, pelayanan publik, ketepatan dalam kebijakan, dan lain sebagainya. Administrasi publik adalah bidang ilmu yang mempelajari tentang bagaimana organisasi publik dikelola (Panjaitan & Pardede, 2021). Pelayanan kepada masyarakat menjadi prioritas utama dalam administrasi publik. Pemerintah bertindak sebagai regulator yang aktif dan berinisiatif dalam mengatur kepentingan masyarakat serta mengambil langkah kebijakan karena kebutuhan publik menjadi sasaran utama kegiatan pemerintah, maka pemerintah harus lebih responsif dan peka terhadap kebutuhan masyarakat.

Mempertimbangkan pendapat para ahli tentang definisi administrasi publik di atas maka administrasi publik merupakan penggabungan teori dan praktek dengan sumberdaya dan publik yang dikoordinasikan agar pelaksanaan kebijakan dapat lebih responsif terhadap kebutuhan publik. Teori administrasi publik digunakan dalam penelitian ini untuk menjalankan program sebagai upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan pariwisata, sehingga penelitian berjudul “Peran *Stakeholder* dalam Pengembangan Pariwisata di Kawasan Dataran Tinggi Dieng Kabupaten Banjarnegara” ini menjadi salah satu fokus dan lokus administrasi publik karena dilakukan oleh pelaku administrasi itu sendiri, yaitu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara sebagai dinas publik yang merupakan salah satu organisasi publik yang bersifat birokrasi publik.

1.7.3 Paradigma Administrasi Publik

Paradigma merupakan cara berpikir yang didasarkan pada nilai-nilai dasar yang terdiri dari konsep, inti teori, asumsi, metodologi, dan pendekatan yang dapat digunakan dalam mengembangkan ilmu dan memecahkan masalah secara teoritis dan praktis (Anwaruddin, 2004). Administrasi publik telah mengalami perkembangan yang cepat agar mampu memenuhi tuntutan perkembangan zaman karena teori dan konsep administrasi publik selalu menyesuaikan dengan lingkungan yang berubah. Enam paradigma administrasi publik dipaparkan seperti berikut;

1. Paradigma I : Dikotomi Politik - Administrasi (1900 - 1926)

Periode paradigma ini ditandai dengan dipublikasikannya 2 (dua) buah karya tulis yang disusun oleh Frank J. Goodnow (1900) dan Leonard D. White (1926). Buku yang ditulis Frank J. Goodnow berjudul “*Political and Administration*” yang pokok pemikirannya adalah pengembangan lebih lanjut dari karya tulis pendahulunya, yaitu Thomas Woodrow Wilson pada tahun 1887. Goodnow menghadapkan administrasi dan politik sebagai 2 (dua) fungsi pemerintah yang terpisah (Denhardt, 1984).

Goodnow menyebutkan bahwa perbedaan fungsi antara politik dan administrasi disebabkan oleh adanya *separation of power* dari jenis lembaga yang ada yaitu, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Penekanan pada paradigma ini diarahkan untuk melihat lokus administrasi negara. Pembagian lokus pada paradigma politik-administrasi berakibat pada

pemisahan wilayah analisis antara Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Politik. Ilmu Administrasi negara lebih memusatkan perhatiannya pada *subject of matter*, sedangkan Ilmu Politik lokusnya pada lembaga legislatif dan yudikatif memiliki sasaran kajian yang berkaitan dengan peran dan fungsi kedua lembaga tersebut.

2. Paradigma II : Prinsip Administrasi Publik (1927 - 1937)

W.F. Willoughby pada tahun 1927 mempublikasikan buku berjudul “*Principles of Public Administration*” yang mengidentifikasi adanya *trend* baru dalam bidang administrasi negara. Buku tersebut memunculkan adanya kepercayaan baru terhadap bidang *public administration*, yaitu prinsip-prinsip administrasi. Luther H. Gullick dan Lyndall Urwick mengemukakan prinsip-prinsip administrasi yang kemudian disingkat POSDCORB (*Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, and Budgeting*). Prinsip-prinsip tersebut dituangkan dalam paper yang berjudul “*Paper on the science of Administration*”. Paradigma kedua ini mengemukakan pendapat bahwa fokus lebih penting daripada lokus. Prinsip-prinsip itu dapat diterapkan secara universal di lembaga-lembaga administratif manapun dengan fokus pada penggalian prinsip-prinsip administrasi yang dapat menunjang kecakapan seorang administrator.

3. Paradigma III : Administrasi Publik Sebagai Ilmu Politik (1950 - 1970)

Periode ini administrasi negara berupaya membangun kembali hubungan konsepsionalnya dengan Ilmu Politik setelah adanya kritik

pada masa sebelumnya. Karya tulis yang membahas Administrasi Negara yang sinonim dengan Ilmu Politik mulai dipublikasikan antara lain karya tulis dari John Meriman Gaus (1950) yang berjudul “*Trend in The Theory of Public Administration*”. Roscoe Martin (1952) juga menulis karya yang berjudul “*Political Science and Publik Administration: A Note of The Union*” yang merupakan suntingan dari karya Fritz Morstein Marx yang berjudul “*Elements of Public Administration*”. Morstein Marx mempertanyakan pemisahan politik dan administrasi sebagai suatu yang tidak mungkin atau tidak realistis (Keban, 2014).

Kelemahan paradigma ini adalah sulit mendefinisikan fokus bidang administrasi negara sebagai keahlian utama. Keban, (2014) menyatakan bahwa administrasi publik sebagai ilmu politik yang lokusnya adalah birokrasi pemerintahan memiliki fokus yang kabur karena prinsip-prinsipnya masih memiliki banyak kelemahan. Mereka yang mengkritik prinsip itu tidak memberikan jalan keluar tentang fokus mana yang dapat digunakan dalam administrasi publik. Pada masa itu, administrasi publik mengalami krisis identitas karena ilmu politik dianggap sangat dominan dalam dunia administrasi publik.

4. Paradigma IV : Administrasi Publik Sebagai Ilmu Administrasi (1956 - 1970)

Periode ini dimulai pada tahun 1956 ditandai dengan terbitnya jurnal “*Administrative Science Quarterly*” yang isinya adalah

meluruskan kembali pemisahan yang keliru antara administrasi negara dengan administrasi niaga serta aspek kelembagaannya. Paradigma ini menfokuskan kajian administrasi negara pada masalah-masalah manajemen dan organisasi. Teori organisasi untuk lebih memahami perilaku organisasi (Akib, 2009), sedangkan ilmu manajemen berdasar pada hasil penelitian dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas program secara lebih tepat dan efisien dari pakar statistik, ekonom, analis sistem, serta pakar administrasi publik. Paradigma keempat ini lebih mementingkan fokus dibandingkan lokus sehingga belum dapat mengatasi permasalahan lokus pada administrasi publik.

5. Paradigma V: Administrasi Publik Sebagai Administrasi Publik (1970 - Sekarang)

Herbert Simon pada awal perkembangan paradigma kelima ini menyebutkan terjadinya perkembangan teori-teori organisasi yang semakin mantap dan terjadi kemajuan dalam bentuk penyempurnaan teknik-teknik terapan dari ilmu manajemen serta penerapannya di lingkungan pemerintahan (sektor publik). Perkembangan ini khususnya memusatkan perhatian pada hal-hal berikut ini dikutip dari Yudhiantara (2021), yaitu bagaimana organisasi bekerja, perilaku orang-orang dalam organisasi, dan mengapa suatu keputusan dibuat. Paradigma ini memiliki fokus dan lokus yang jelas. Dalam paradigma kelima ini, teori kebijakan publik, manajemen, dan organisasi menjadi titik fokus administrasi publik, sedangkan, lokusnya adalah kepentingan dan masalah-masalah publik (Keban, 2014). Hal ini selaras dengan yang

dikatakan Henry (1968) yaitu pemerintah publik semakin tertarik dengan bidang ilmu politik, ekonomi politik, proses membuat undang-undang publik, dan analisis undang-undang.

6. Paradigma VI : *Governance* (1990-Sekarang)

Paradigma keenam merupakan paradigma terbaru dan tersusun atas serangkaian paradigma yang sudah dikemukakan sebelumnya pada proses perkembangan ilmu administrasi publik. Pilar paradigma ini, yakni pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta (Pandji, 2008). Paradigma ini berbeda dengan paradigma lainnya, yaitu di mana pemerintah digambarkan sebagai penyelenggara pemerintahan. Paradigma ini diarahkan ke *governance* yang menjelaskan tentang perpaduan di dalam stabilitas sektor swasta, masyarakat, dan pemerintah.

Penelitian berjudul “Peran *Stakeholders* dalam Pengembangan Pariwisata Di Kawasan Dataran Tinggi Dieng Kabupaten Banjarnegara” termasuk kedalam paradigma administrasi publik yang keenam. Paradigma keenam, yaitu paradigma *Governance* berbicara tentang bagaimana pemerintah dapat berkembang ke arah pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan memberikan pelayanan publik yang baik dan meningkatkan kinerja untuk mencapai kepuasan masyarakat selaku pengguna pelayanan publik. Hal ini karena paradigma *governance* tersusun atas paradigma-paradigma sebelumnya

dan menitikberatkan pada peran serta pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta.

1.7.4 Manajemen Publik

Woodrow Wilson adalah pelopor manajemen publik dan ia menulis buku berjudul “*The Study of Administration*” pada tahun 1887. Fokus penelitian Woodrow Wilson adalah untuk memperbaiki fungsi eksekutif lembaga pemerintahan yang dianggap telah keluar dari batas kewajaran karena adanya gejala Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dan untuk mengadopsi prinsip manajemen bisnis. Empat prinsip dasar dalam studi administrasi publik juga dijelaskan oleh Wilson (dalam Keban, 2014), yaitu : (1) Pemerintah sebagai *setting* utama organisasi, (2) Fungsi eksekutif sebagai fokus utama, (3) Pencarian prinsip – prinsip dan teknik manajemen yang lebih efektif sebagai kunci pengembangan kompetensi administrasi, dan (4) Metode perbandingan sebagai suatu metode studi dan pengembangan bidang administrasi publik (Keban, 2014).

Sementara itu, Donovan dan Jackson (dalam Keban, 2014) memberikan tugas manajemen yang terdiri perencanaan, pengorganisasian, *staffing*, *leading*, dan *controlling*. Satibi (2023) esensi manajemen publik diharapkan mampu menampilkan produk pelayanan yang prima dan sesuai dengan tuntutan serta kebutuhan publik sehingga diarahkan pada institusi publik untuk mengelola sektor-sektor publik secara profesional dan proporsional melalui pemanfaatan sumber daya organisasi dan potensi. Manajemen publik tidak hanya sekedar melakukan pengelolaan terhadap sektor publik, tetapi juga hasil dari pengelolaan tersebut mampu memberikan dampak kepada masyarakat secara optimal. Terdapat

prinsip dasar yang melandasi efektivitas pelaksanaan manajemen publik adalah sebagai berikut :

1. Akuntabel, artinya dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan yang direncanakan
2. Transparan, berarti harus bersifat terbuka dan dapat diakses oleh berbagai *stakeholder* termasuk masyarakat
3. Responsif, yaitu mempertimbangkan keinginan, aspirasi, harapan, dan kebutuhan masyarakat
4. Efektif, berarti memperhatikan prinsip efektivitas dalam bentuk pencapaian target serta tujuan yang telah ditetapkan
5. Efisien, yaitu mampu menggunakan sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan
6. Adaptif, berarti bisa mengadaptasikan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan, sistem informasi, dan teknologi, sehingga praktik manajemen publik diharapkan mampu mengikuti perubahan dan mengatasi permasalahan dalam dinamika kehidupan masyarakat
7. Rasional, yaitu dapat dicerna secara logis, tidak mengada-ada, dan tanpa sasaran yang jelas. Tujuannya adalah agar setiap orang mampu memahami mengapa program harus dilaksanakan
8. Profesional, berarti program yang ditetapkan dilakukan oleh para *stakeholder* yang memiliki keahlian, kemampuan, dan kompetensi yang memadai

Kaitannya dengan pengembangan potensi pariwisata di Kawasan Dataran Tinggi Dieng Kabupaten Banjarnegara adalah cara manajemen suatu kebijakan dengan baik agar tercapai tujuan dan memaksimalkan upaya yang dilakukan. Kurangnya pengetahuan dalam mengorganisasikan suatu kebijakan akan mengurangi kualitas hasil dari upaya yang telah dilakukan.

1.7.5 Stakeholder

Individu atau kelompok yang terlibat dan memiliki kepentingan, terhadap suatu program pembangunan disebut *stakeholder* (Hetifah, 2003). Sjaifudian (dalam Berliandaldo dkk., 2021) membagi pemangku kepentingan menjadi dua kategori, yaitu *stakeholder* primer dan *stakeholder* sekunder. Reed (dalam Saputro, 2011) *stakeholder* adalah orang, kelompok, atau institusi yang memiliki kepentingan dalam suatu proses atau pariwisata. Analisis *stakeholder* digunakan untuk mengidentifikasi dan menilai kepentingan para pemangku kepentingan yang ikut andil dalam melakukan suatu program (Salsabila & Santoso, 2018). Pengelolaan kepentingan dan kebutuhan yang baik dapat menjadi langkah untuk mencapai tujuan. *Stakeholder* merupakan seluruh lapisan masyarakat yang memiliki kepentingan dan terlibat secara langsung dalam kegiatan atau program pembangunan. *Stakeholders* dibagi menjadi tiga kelompok menurut Crosby (1992), yaitu sebagai berikut :

a. Stakeholder utama (Primer)

Stakeholder primer adalah *stakeholder* yang terkena dampak secara positif maupun negatif dari suatu rencana serta secara langsung

memiliki kepentingan dengan kegiatan dan perlu dilibatkan secara penuh sepanjang proses kegiatan. *Stakeholder* utama atau primer ini menjadi penentu keberhasilan pembangunan termasuk dalam bidang pariwisata. *Stakholder* primer dalam pengembangan destinasi pariwisata adalah masyarakat lokal yang tinggal di sekitar lokasi objek wisata. Masyarakat menjadi pelaku utama dalam pengembangan pariwisata sebagai sumber daya manusia yang mengelola dan mengembangkan destinasi wisata agar lebih kreatif dan inovatif. Masyarakat sebagai *stakeholders* primer dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu :

1. Masyarakat sebagai pembangun fasilitas destinasi wisata
2. Masyarakat menjadi pengelola destinasi wisata
3. Masyarakat menjadi pengguna dan pengambil manfaat dari destinasi wisata

b. *Stakeholder* Kunci

Stakeholder kunci memiliki pengaruh penting terkait dengan kebutuhan, permasalahan dan perhatian terhadap kelancaran kegiatan. Mereka adalah pemangku kepentingan yang memiliki kewenangan secara legal dalam pengambilan keputusan, yaitu pemerintah daerah terkait yang memiliki wewenang legislatif dan eksekutif dalam penentuan kebijakan pengembangan pariwisata. *Stakeholder* kunci memiliki tugas sebagai pembuat kebijakan dan program, sebagai

pelaksana kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyuluhan, dan pemberi bantuan teknis dalam pengembangan wisata.

c. *Stakeholder* Pendukung (Sekunder)

Stakeholder pendukung juga disebut sebagai *stakeholder* sekunder adalah aktor kepentingan yang tidak sangat peduli dengan proses pengembangan tetapi mereka tidak memiliki kepentingan langsung terhadap suatu rencana. *Stakeholder* ini menjadi fasilitator dalam proses pengembangan kegiatan dan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan. Investor atau pihak swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), akademisi atau peneliti dan media termasuk pemangku kepentingan pendukung (sekunder). *Stakeholder* sekunder menjadi pihak yang memberi pertimbangan dan masukan kepada pemerintah dalam pengambilan keputusan kebijakan atau program.

Stakeholder sekunder juga memberikan pengaruh pada sikap masyarakat dalam memberikan pandangan dan langkah yang harus diambil dalam pengembangan destinasi wisata. Misalnya, akademisi memiliki peran penting dalam melakukan riset dan penelitian untuk menghasilkan suatu ide atau strategi baru dalam pengembangan wisata yang lebih inovatif, sedangkan pihak swasta menjadi pendukung dalam pengadaan dan pembangunan fasilitas pelengkap di destinasi wisata.

1.7.6 Peran Stakeholder

Menurut Soekamto (dalam Handayani & Warsono, 2017) seseorang dianggap menjalankan peran apabila telah melakukan hak dan kewajiban sesuai

dengan kedudukan dan kewenangan yang dimiliki. Keberhasilan pelaksanaan kebijakan tidak dapat lepas dari peran *stakeholder* atau pemangku kepentingan. Ginting dkk (2022) menyatakan bahwa dalam setiap kegiatan pembangunan, *stakeholder* memiliki sumber daya dan kepentingannya masing-masing yang harus terwakili dalam proses pengambilan keputusan sehingga pengembangan kegiatan dapat terealisasi dengan optimal. *Stakeholder* memiliki peran yang dominan dalam program pembangunan termasuk dalam pengembangan. Menurut Nugroho dkk., (2014) *stakeholders* memiliki peran sebagai *policy creator*, koordinator, fasilitator, dan implementor. Keempat peran ini melekat pada *stakeholders* utama, kunci, dan pendukung.

1. ***Policy creator***, yaitu *stakeholder* berperan sebagai pengambil keputusan dan penentu kebijakan karena memiliki legitimasi untuk menentukan arah kebijakan. Untuk menjalankan peran ini tentunya harus memiliki dasar atau konsep dalam mengidentifikasi fenomena dan masalah yang ada, memiliki analisa alternatif pemecahan masalah, serta mampu memilih alternatif terbaik dari suatu pemecahan masalah.
2. ***Koordinator***, yaitu *stakeholder* berperan dalam mengkoordinasikan pemangku kepentingan lain yang terlibat. Artinya, mampu mengakomodir kebutuhan, mengarahkan, mengintegrasikan unsur-unsur pengelolaan dan pekerjaan, serta kepentingan *stakeholder* yang terkait.
3. ***Fasilitator***, yaitu *stakeholder* sebagai fasilitator yang berperan memfasilitasi dan mencukupi apa yang dibutuhkan kelompok sasaran.

Fasilitator juga sebagai pemandu proses atau seorang yang membuat sebuah kebijakan menjadi lebih mudah dalam menjalankannya. Pemenuhan kebutuhan atau fasilitasi menjadi sarana pendukung dalam menjalankan program atau kegiatan.

4. **Implemmentor**, yaitu *stakeholder* sebagai pelaksana kebijakan di dalamnya termasuk kelompok sasaran.
5. **Akselerator**, yaitu *stakeholder* berperan mempercepat dan memberikan kontribusi agar suatu program dapat berjalan sesuai sasaran atau bahkan lebih cepat waktu pencapaian.

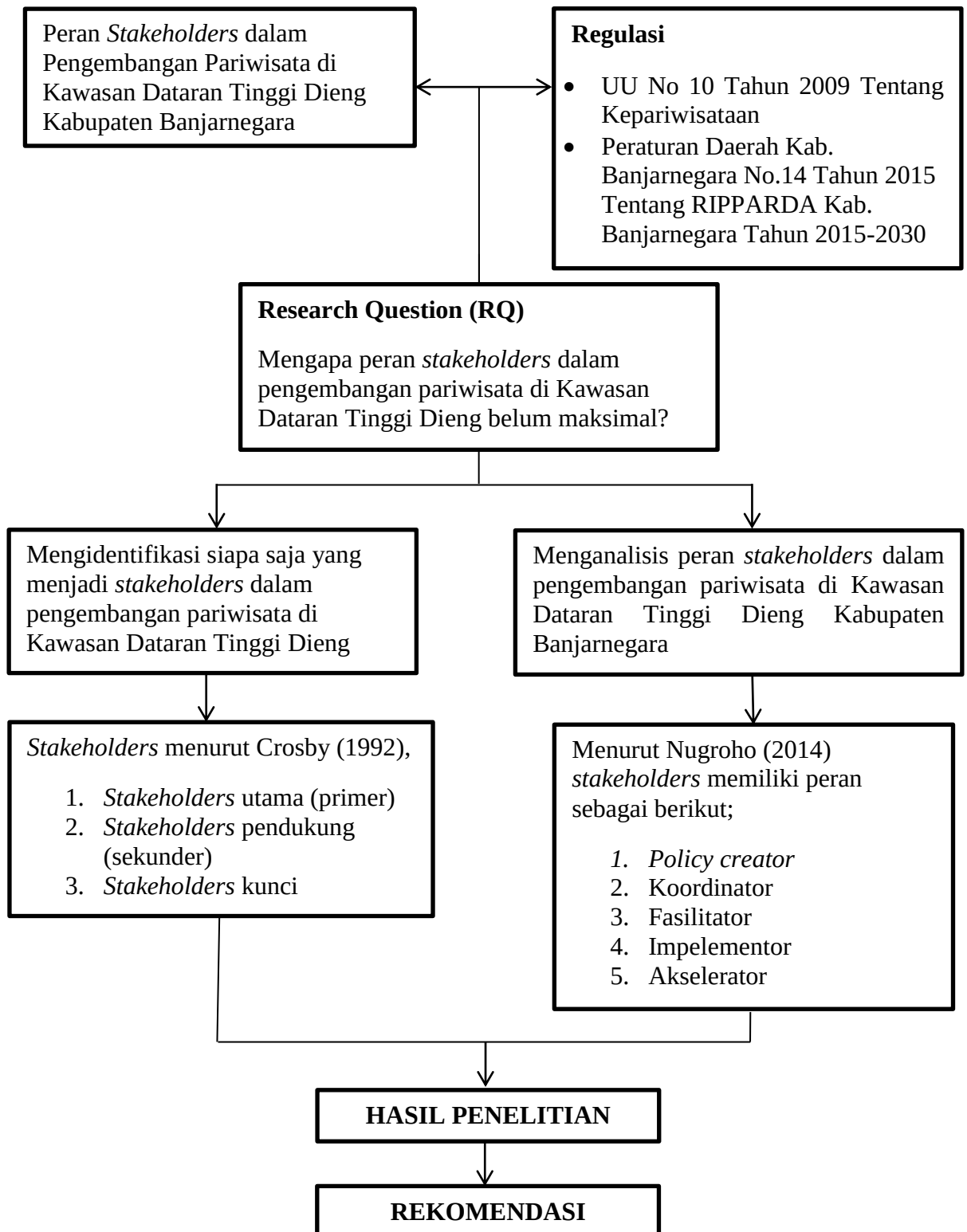
1.7.7 Pariwisata

Pariwisata menjadi fenomena yang saat ini populer dikembangkan oleh berbagai negara sebagai penghasil devisa negara. Sumberdaya yang dimiliki tiap-tiap daerah digunakan untuk mencapai kesejahteraan dengan menggunakannya seoptimal mungkin sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal ini tentunya tidak lepas dari adanya partisipasi masyarakat. Pariwisata merupakan suatu perjalanan dengan tujuan merefresh dan menenangkan pikiran. Terdapat beberapa pengertian tentang pariwisata menurut para ahli diantaranya sebagai berikut :

- a. James J. Spillane (dalam Hadiwijoyo, 2012), Pariwisata merupakan perjalanan yang singkat dan dilakukan oleh satu orang atau lebih dalam bentuk kelompok sebagai usaha mencari keseimbangan sosial budaya.

- b. Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, Pariwisata adalah beragam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.
- c. Meyers & Zalukhu (2009), Pariwisata adalah perjalanan yang dilakukan sementara waktu dari tempat tinggal semula ke daerah tujuan dengan alasan hanya untuk berlibur, memenuhi rasa ingin tahu, atau menghabiskan waktu senggang.

1.8 Kerangka Penelitian



1.9 Operasional Konsep

Operasionalisasi konsep adalah tahapan dalam proses pengumpulan data dengan mengubah gagasan yang masih abstrak menjadi gagasan yang memungkinkan pengukuran variabel lebih mudah. Operasionalisasi juga didefinisikan sebagai batasan konsep yang digunakan sebagai pedoman dalam kegiatan penelitian. Agar pengembangan pariwisata di Kawasan Dataran Tinggi Dieng Kabupaten Banjarnegara berjalan dengan baik maka semua pihak yang bertanggung jawab harus memainkan peran mereka dan bekerjasama untuk mencapai tujuan. Sesuai dengan teori para ahli yang digunakan maka fokus yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Identifikasi *Stakeholders* dalam pengembangan pariwisata di Kawasan Dataran Tinggi Dieng berdasarkan posisi, kekuatan, serta pengaruhnya dalam organisasi dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu, sebagai berikut;

- a. *Stakeholders* utama (primer)

Stakeholders primer adalah *stakeholders* yang memiliki kaitan erat dengan penyusunan kebijakan dan program dalam pengembangan pariwisata di Kawasan Dataran Tinggi Dieng. Mereka adalah pihak penentu yang paling utama dalam tahapan-tahapan kegiatan dan pengambilan keputusan. Fenomena yang akan diteliti antara lain ;

- 1) Masyarakat sebagai pembangun fasilitas
- 2) Masyarakat sebagai pengelola destinasi wisata

- 3) Masyarakat sebagai pengguna dan pengambil manfaat dari destinasi wisata

b. *Stakeholders* Kunci

Stakeholders pendukung adalah *stakeholders* yang memiliki pengaruh dan suara dari pelaksanaan pengembangan pariwisata di Kawasan Dataran Tinggi Dieng. *Stakeholders* ini juga merupakan pihak yang tidak berhubungan langsung atas suatu program, kebijakan atau kegiatan. Fenomena yang akan diteliti antara lain ;

- 1) *Stakeholders* sebagai pembuat kebijakan dan program
- 2) *Stakeholders* sebagai pelaksana kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyuluhan, dan pemberi bantuan teknis dalam pengembangan wisata

c. *Stakeholders* Pendukung (Sekunder)

Stakeholders kunci adalah *stakeholders* yang memiliki kewenangan secara legal dalam menentukan kebijakan dan pengambilan keputusan pengembangan pariwisata di Kawasan Dataran Tinggi Dieng. Fenomena yang akan diteliti antara lain ;

- 1) *Stakeholders* sebagai fasilitator dalam proses pengembangan kegiatan
- 2) *Stakeholders* yang memberi pertimbangan dan masukan dalam pengambilan keputusan, serta memberikan pengaruh dan pandangan pada sikap masyarakat

2. Klasifikasi peran *stakeholders* dalam pengembangan pariwisata di Kawasan Dataran Tinggi Dieng meliputi;
 - a. *Policy creator* adalah *stakeholders* yang berperan sebagai pengambil keputusan dan penentu suatu kebijakan. Fenomena yang akan diteliti antara lain;
 - 1) *Stakeholders* yang berwenang dalam membuat program dan mengambil keputusan kebijakan
 - 2) Mengidentifikasi fenomena dan memilih alternatif terbaik untuk mengatasi permasalahan
 - b. Koordinator adalah *stakeholders* yang berperan mengkoordinasikan *stakeholders* lain yang terlibat. Fenomena yang akan diteliti antara lain;
 - 1) *Stakeholders* yang berperan mengkoordinasikan *stakeholders* lain yang terlibat dan mengakomodir kebutuhan
 - 2) *Stakeholders* yang mengarahkan dan mengintegrasikan pengelolaan
 - c. Fasilitator adalah *stakeholders* yang berperan memfasilitasi kebutuhan kelompok sasaran. Fenomena yang akan diteliti antara lain;
 - 1) *Stakeholders* yang berperan memfasilitasi dan memenuhi kebutuhan dalam pengembangan pariwisata
 - 2) Bentuk fasilitas yang disediakan dan pengelolaannya
 - d. Implementor adalah *stakeholders* pelaksana kebijakan. Fenomena yang akan diteliti antara lain :

- 1) *Stakeholders* yang terlibat sebagai pelaksana pengembangan pariwisata di Kawasan Dataran Tinggi Dieng
 - 2) Peran yang dilakukan dalam pengembangan pariwisata di Kawasan Dataran Tinggi Dieng
- e. Akselerator adalah *stakeholders* yang berperan dalam percepatan pencapaian tujuan atau sasaran. Fenomena yang akan diteliti antara lain:
- 1) *Stakeholders* yang memiliki peran dalam mempercepat dan memberikan kontribusi agar suatu program dapat berjalan sesuai tujuan
 - 2) Bentuk kontribusi yang dilakukan untuk mempercepat waktu pencapaian tujuan

1.10 Argumen Penelitian

Penelitian ini didasarkan pada keingintahuan penulis mengenai peran *stakeholder* dalam pengembangan pariwisata di Kawasan Dataran Tinggi Dieng Kabupaten Banjarnegara yang memiliki potensi pariwisata dan telah lama dikembangkan namun masih terdapat permasalahan yang hingga kini belum bisa teratasi. Peneliti berpendapat bahwa terkait dengan hal tersebut, tentunya peran dari *stakeholders* sangat diperlukan dan perlu dikaji kembali apakah sudah optimal dalam mengembangkan pariwisata di Kawasan Dataran Tinggi Dieng Kabupaten Banjarnegara. Peneliti berusaha mencari tahu dengan menentukan rumusan masalah, yaitu tentang siapa saja yang terlibat atau berkontribusi dalam pengembangan pariwisata dan apa peran yang dilakukan para pemangku

kepentingan tersebut dalam pengembangan pariwisata di Kawasan Dataran Tinggi Dieng Kabupaten Banjarnegara.

1.11 Metode Penelitian

1.11.1 Definisi Penelitian

Menurut Sugiyono (2013) metode merupakan langkah ilmiah dalam memperoleh data. Langkah ilmiah sebagai aktivitas dalam penelitian yang berdasarkan kriteria keilmuan, yaitu empiris, rasional, dan sistematis. Menurut Pasolong (2012) terdapat tiga tipe di dalam penelitian, yaitu :

- a. Penelitian Deskriptif (Penggambaran) : Penelitian ini menggambarkan situasi yang terjadi selama penelitian berlangsung. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan analisis, menggambarkan, mencatat, dan menginterpretasikan kedalam kondisi saat ini. Dalam penelitian deskriptif, masalah yang diangkat harus layak, mengandung nilai ilmiah, dan sifatnya tidak terlalu luas. Penelitian ini dipaparkan dalam bentuk informasi yang obyektif.
- b. Penelitian Eksploratif (Penjajakan) : Penelitian eksploratif adalah jenis penelitian yang bersifat terbuka, tidak memiliki hipotesa, dan terus mengeksplorasi informasi untuk menemukan masalah yang kemudian diangkat ke dalam penelitian dan dibahas secara lebih mendalam.
- c. Penelitian *Explanatory* (Penjelasan) : Penelitian *explanatory* adalah penelitian yang difokuskan pada hubungan antar variabel dan menguji hipotesa yang telah dibuat.

Penelitian ini dirancang sebagai penelitian kualitatif deskriptif untuk mengumpulkan data lisan dan tulisan dari pihak-pihak yang diamati. Menurut Ramdhan (2021) dalam penelitian kualitatif landasan teori digunakan sebagai pengarah agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Pemilihan desain penelitian disebabkan karena keinginan peneliti untuk melangsungkan penganalisaan sekaligus pendeskripsian terhadap peran *stakeholders* dalam pengembangan pariwisata di Kawasan Dataran Tinggi Dieng Kabupaten Banjarnegara yang bertujuan untuk mendeskripsikan, mencatat, menganalisa, dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini ada atau terjadi.

1.11.2 Lokus dan Fokus Penelitian

Lokus penelitian adalah tempat dilakukannya penelitian karena ditemukan sesuatu yang menarik untuk dikaji. Pemaparan secara rinci tentang lokasi penelitian seharusnya mengisyaratkan tentang alasan mengapa lokasi penelitian tersebut dipilih oleh peneliti. Penetapan lokasi penelitian merupakan tahap yang terpenting dalam penelitian kualitatif karena melalui penetapan lokasi penelitian maka objek dan tujuan penelitian dapat ikut ditetapkan guna mendapatkan data primer. Peneliti memutuskan melangsungkan penelitian di Kawasan Dataran Tinggi Dieng yang terletak di dua wilayah administratif yang terpisah, yaitu di Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Banjarnegara. Agar penelitian tidak bersifat meluas dan fokus penelitian dapat tercapai maka peneliti akan membatasi wilayah penelitian dengan mengambil lokasi penelitian di Dieng Kulon, Kabupaten Banjarnegara. Fokus penelitian ini adalah identifikasi dan peran dari *stakeholders* dalam pengembangan pariwisata.

1.11.3 Subyek Penelitian

Menurut Suharsimi (2006) subyek penelitian adalah orang yang menjadi informan dan dapat memberikan data sesuai dengan masalah yang akan diteliti. Subyek Penelitian merupakan seseorang ataupun sekelompok orang yang dimintai keterangan terkait sebuah fakta ataupun pendapat pribadi. Informan ini mengetahui dan menguasai kondisi sekitar serta terlibat langsung dengan masalah penelitian. Penelitian ini membutuhkan partisipasi dari aktor atau *stakeholders* yang berperan dalam pengembangan pariwisata di Kawasan Dataran Tinggi Dieng Kabupaten Banjarnegara, yang dilakukan melalui wawancara. Adapun informan dalam penelitian ini terdiri dari :

Tabel 1.3 **Daftar Informan Penelitian**

No	Nama	Jabatan
1	Informan 1	Kepala Seksi SDM Pariwisata Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Pariwisata di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara
2	Informan 2	Kepala Bidang Destinasi Pariwisata di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara
3	Informan 3	Kepala Bidang Pemasaran di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara
4	Informan 4	Kepala UPTD Kawasan Wisata Dataran Tinggi Dieng Kabupaten Banjarnegara
5	Informan 5	Ketua Paguyuban Homestay Dieng Kulon Kabupaten Banjarnegara
6	Informan 6	Ketua Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Dieng Pandawa Kabupaten Banjarnegara
7	Informan 7	Masyarakat Desa Dieng Kulon
8	Informan 8	Sekretaris Desa Dieng Kulon

Sumber : diolah oleh penulis, 2024

1.11.4 Jenis Data

Jenis data digolongkan menjadi data data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif berupa kata atau kalimat yang dapat didefinisikan, sedangkan data kuantitatif berupa angka. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang berbentuk deskriptif berupa kata-kata lisan atau tulisan. Menurut Patton (dalam Agusta, 2003) terdapat tiga jenis data kualitatif, yaitu sebagai berikut:

1. Hasil pengamatan, berisi uraian rincian tentang kejadian, situasi, tingkah laku, dan interaksi di lapangan.
2. Hasil pembicaraan, berupa kutipan langsung dari pernyataan narasumber saat wawancara tentang sikap, pengalaman, keyakinan, dan pemikiran mereka.
3. Dokumen, bahan tertulis, petikan, surat, studi kasus, rekaman, dan sebagainya.

1.11.5 Sumber Data

Sumber data merupakan sesuatu yang bernilai informatif bagi kelangsungan penelitian terkait data penelitian. Sumber data menurut Sugiyono (2010: 137) dapat dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut :

- a. Data Primer, adalah sumber data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan informan dan kegiatan observasi di lokasi penelitian.
- b. Data Sekunder, adalah sumber data yang diperoleh secara tidak langsung, misalnya melalui perantara pihak ketiga atau berdasarkan

analisis terhadap suatu dokumen literatur, jurnal, artikel maupun situs internet.

1.11.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data untuk menjawab permasalahan penelitian. Terdapat 3 (tiga) teknik pengumpulan data, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dijelaskan sebagai berikut :

1. Teknik Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan mengajukan dan memberikan jawaban atas pertanyaan. Pihak yang memberikan jawaban disebut narasumber atau informan. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data dan fakta di lapangan. Menurut Fathoni (2006) bahwa terdapat 2 (dua) bentuk wawancara, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Wawancara langsung dilakukan secara tatap muka dengan informan, sedangkan wawancara tidak langsung dilakukan melalui perantara seperti radio, telepon, dan sebagainya. Pada langkah ini peneliti mendapatkan informasi melalui tanya jawab dengan narasumber atau yang kemudian disebut sebagai *stakeholders* dalam pengembangan pariwisata di Kawasan Dataran Tinggi Dieng.

2. Teknik Pengamatan/Observasi

Observasi adalah kegiatan pengamatan secara langsung disertai pencatatan kondisi lokasi penelitian dan perilaku objek sasaran. Zuriah, (2006) mengemukakan bahwa observasi dibagi menjadi 2 (dua) yaitu secara langsung dan tidak langsung. Observasi secara langsung

dilakukan bersamaan dengan objek yang diselidiki, sedangkan secara tidak langsung dilakukan dengan mengamati foto, video, film, slide, dan sebagainya. Adapun dalam penelitian ini digunakan teknik observasi langsung dengan mengamati partisipasi dan kondisi lokasi penelitian untuk mengamati : (1) Potensi pariwisata di Kawasan Dataran Tinggi Dieng, (2) Kondisi dan situasi wisata meliputi akses, fasilitas, aktivitas, kegiatan dan sebagainya di lokasi destinasi wisata , (3) Identifikasi, peran, dan keterlibatan *stakeholders* dalam pengembangan pariwisata, (4) Respon dan dampak pengembangan pariwisata, dan (5) Program proyek pariwisata yang melibatkan *stakeholders*.

3. Teknik Dokumentasi

Menurut Ulfatin (dalam Wahidmurni, 2017) menyatakan bahwa dokumentasi dalam penelitian kualitatif untuk menyempurnakan data wawancara dan observasi yang telah dilakukan. Sumber informasi ini dapat berupa tulisan, gambar, atau karya monumental dari obyek yang diteliti. Rentetan peristiwa yang tercatat, digambarkan, ataupun terekam disebut dengan dokumentasi. Sumber tertulis yang didokumentasikan seperti makalah, laporan akhir, laporan penelitian, jurnal, buku, dan sebagainya yang kemudian dikumpulkan, digali, dikaji, dan dipelajari melalui teknik dokumentasi. Peneliti menggunakan teknis dokumentasi untuk menambah, mengembangkan, dan memperkuat data-data yang diolah dan dijadikan hasil penelitian.

1.11.7 Analisis dan Interpretasi Data

Menurut Zuriah (2006) ada dua cara dalam menganalisis data, yaitu secara nonstatistik yang bertujuan untuk mempelajari masalah secara menyeluruh. Kedua, secara statistik yang bersifat kuantitatif dengan mendasarkan pada asumsi yang harus dipenuhi. Penelitian kualitatif dilakukan sebelum ke lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Menurut Zuriah (2006) tahapan pengolahan dan analisis data adalah sebagai berikut:

1. Reduksi data (*data reduction*) : Mereduksi berarti mengumpulkan, menyingkirkan, merangkum, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.
2. Penyajian data (*data display*) : Penyajian data dalam penelitian kualitatif dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya.
3. Kesimpulan (*Conclusion/Verification*) : Kesimpulan oleh peneliti ketika didukung oleh bukti yang valid dan konsisten maka kesimpulan yang dikemukakan dapat dipercaya.

Ketiga tahapan kegiatan analisis data di atas saling berhubungan satu sama lain. Dengan demikian, kesimpulan yang dipaparkan dalam penelitian kualitatif kemungkinan dapat menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak

awal, tetapi mungkin juga tidak karena rumusan masalah masih bersifat sementara dan akan terus berkembang setelah dilakukan penelitian di lapangan.

1.11.8 Kualitas Data dan Keabsahan Data

Penelitian kualitatif harus sesuai dengan standar akan kredibilitas. Penyesuaian ini dilakukan agar kebenaran data sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Triangulasi menjadi langkah dalam memeriksa keabsahan sebuah data berdasarkan sumbernya. Penerapan teknik trigulasi dalam menghimpun data penelitian menghasilkan data yang diperoleh bernilai konsisten, tuntas, dan akurat. Moleong (2009) menjelaskan langkah dalam mentrigulasi data, yakni membuat perbandingan dari hasil data yang didapatkan, data tersebut di antaranya sebagai berikut; (1) data hasil observasi dan wawancara, (2) data pernyataan secara personal dan umum, (3) data yang dikemukakan oleh publik terkait situasi selama penelitian, (4) sudut pandang dan kondisi seseorang saat berpendapat, misalnya berdasarkan tingkat pendidikan dan kedudukannya, dan (5) data hasil wawancara terhadap dokumen yang berhubungan dengan permasalahan

1.11.9 Teknik Penentuan Informan

Menurut Kaharuddin (2021) terdapat teknik penentuan informan dalam penelitian kualitatif yaitu, sebagai berikut :

1. Teknik *Purposive* : merupakan teknik pengambilan informan secara sengaja dengan memperhatikan kriteria seperti pemerintah dengan jabatan tertentu, masyarakat umum, dan informan lain yang berkaitan dengan penelitian. Pengambilan informan ini dilakukan secara senagaja oleh peneliti.

2. Teknik *Snowball* : merupakan teknik penentuan informan secara berantai yaitu dari informan satu ke informan berikutnya sampai data yang dibutuhkan sudah cukup.
3. Kuota : merupakan teknik pengambilan informan berdasarkan kuota yang diinginkan berdasarkan prediksi peneliti itu sendiri. Jumlah kuota yang dibutuhkan disesuaikan dengan proses pengambilan data di lapangan
4. *Incidental* : merupakan teknik pengambilan informan berdasarkan kebutuhan, yaitu siapa saja dapat menjadi informan selama itu cocok sebagai sumber data